

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
SEKRETARIAT DEPUTI**

NOTA DINAS
NOMOR: AK.03.01/170/D.II.M.EKON.1/7/2026

Yth. : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan
Investasi
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 10 Juli 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan II Tahun 2026. Adapun narasi capaian kinerja dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/LapkinTW2SesdepD2> sedangkan dokumen pendukung capaian kinerja tersebut dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/BuktiDukungTw2SesdepD2>.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi dan Investasi,



Jenny M.T. Sihombing
NIP. 197906122005022001

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	50	45,5	90,9
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	50	50	100
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	50	50	100
1.4	Indikator 1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	100	50	50	100
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	%	100	50	50	100
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	75	N/A	N/A	100
1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100

Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 7 indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian dokumen/laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi Reformasi Birokrasi diukur dari kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mendukung pencapaian indikator RB Kementerian sebagaimana diatur pada Peraturan Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Penilaian kegiatan Reformasi Birokrasi diukur dari pemenuhan bukti dukung sebagai berikut:

No	Indikator	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Ketepatan Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1	Rencana	Pemetaan	1	Mengacu ND Biro	Triwulan

	Aksi Pembangunan RB	Rencana Aksi RB Tematik 2026	Dokumen	MKKS	III
2	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja	7 Dokumen	Dokumen tertandatangani	Triwulan III
3	Tingkat Maturitas SPIP	1. Dokumen Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP 2. Dokumen matriks Manajemen Risiko	8 Dokumen	Dokumen tertanda-tangani	1. SPIP: TW II 2. MR: TW III
4	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	1 Dokumen	Mengacu ND Inspektur	Mengacu ND Inspektur
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Revisi Renja 2026 2. Usulan Renja 2027 3. TOR RAB setelah revisi Renja 2025	3 Dokumen	Mengacu ND Biro MKKS	1. Revisi Renja 2026: TW II 2. Renja 2027: TW I 3. TOR-RAB Revisi: TW III
6	Tingkat Digitalisasi Arsip	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Dokumen	Dokumen terdisposisi Dokumen tertandatangani	Tanggal 5 bulan berikutnya
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	- Laporan Realisasi Anggaran - Rencana Penarikan	16 Dokumen	Uraian program/kegiatan/RO/Komponen Pagu	Tanggal 5 bulan berikutnya

		Dana (RPD)		Realisasi Sisa anggaran	
8	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)	Dokumen Hasil Tindak lanjut Laporan Hasil pemantauan SP4N-LAPOR!	2 Dokumen	Mengacu ND Inspektorat	Triwulan II dan IV
9	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Dokumen pengisian dan pencatatan SIRUP	2 Dokumen	SIRUP terisi lengkap	Triwulan I dan IV
10	Indeks Sistem Merit	▪ Dokumen pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN ▪ Dokumen usulan formasi ASN	2 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Umum	▪ E-Kinerja: TW I ▪ Usulan Formasi : TW IV
11	Capaian IKU	Laporan Kinerja Triwulanan	4 Dokumen	▪ Ringkasan Kinerja Triwulanan ▪ Narasi setiap IKU a. Latar belakang b. Hasil pengukuran kinerja c. Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya d. Kendala dan upaya perbaikan	Mengacu pada ND Kepala Biro MKKS

				pencapaian target	
12	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen Pendukung pemeriksaan BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II Tahun berikutnya
13.	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Dokumen hasil rekomendasi BPK	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II dan IV
14	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Dokumen Usulan data responden Internal dan Eksternal	1 Dokumen	Mengacu ND dari Inspektorat	Triwulan II
15	Indeks BerAKHLA K	Dokumen Usulan Agen Perubahan	1 Dokumen	Mengacu ND dari Biro Hukum dan Organisasi	Triwulan II
Total			64 Dokumen		

Terdapat koreksi untuk jumlah dokumen sesuai yang dicantumkan pada tabel di atas yaitu menjadi 64 dokumen dikarenakan ada kesalahan perhitungan pada dokumen manual IKU.

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi :

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang direvisi}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen perencanaan Sekretariat Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 50%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target dengan realisasi sebesar 50% atau mencapai kinerja 100% dari target Tw II Tahun 2026. Ringkasan realisasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	%	50	45,45	90,9 (Memuaskan)

Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi yang telah dihasilkan sesuai standar pada triwulan II 2026 antara lain:

1. Laporan Kinerja (1 dokumen)
2. Rekap Dokumen dalam Srikandi (3 Dokumen)
3. Laporan Realisasi Monev Anggaran (3 Dokumen)
4. Dokumen RPD (1 dokumen)
5. Dokumen Bahan Pimpinan (1 Dokumen)
6. Dokumen Pendukung Pemeriksaan Keuangan BPK (1 paket Dokumen)
7. Dokumen Koordinasi Hasil Rekomendasi BPK (1 Dokumen)
8. Dokumentasi Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK (1 dokumen) melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Deputy kepada Para Asisten Deputy Nomor: HM.02/100/D.II.M.EKON.1/04/2026 Tanggal 24 April 2025 Hal Penyampaian Pembaruan Brand Guidelines Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagai bagian dari upaya internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam setiap aktivitas organisasi.

Selain beberapa dokumen yang telah disampaikan diatas, juga telah dilaksanakan koordinasi antara Sekretariat Deputy dengan Para Asisten Deputy terkait pelaksanaan Penyampaian Panduan Pengisian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: RB.01/141/D.II.M.EKON.1/06/2026 tanggal 10 Juni 2026.

Pada triwulan II juga telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi tanggal 26 Mei 2026 terkait penyusunan formulir terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara Online melalui sistem Kemenpan RB yang dapat diakses melalui <https://skm.go.id/> dan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan pengumpulan data dukung dan rencana pelaksanaan survei kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui istem Kemenpan RB yang dapat diakses melalui <https://evaluasi.menpan.go.id/>.

Capaian optimal pada triwulan II berhasil direalisasikan karena adanya komitmen kuat pimpinan dalam mengawal implementasi delapan area perubahan reformasi birokrasi. Sekretariat Deputy juga berhasil melakukan pemetaan alur tata laksana (*business process management*) dan menyelaraskan dokumen sistem akuntabilitas kinerja, sehingga seluruh data dukung (*evidence*) administrasi kedeputian dapat terkonsolidasi dengan baik dan tepat waktu.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja	Terlaksana	Telah selesai dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulan II sesuai dengan Nota Dinas dari MKKS.
2.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama triwulan II.

3.	Monev Realisasi Anggaran Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui E-Monev di Triwulan II.
4.	Penyusunan RPD Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan pengisian matrik RPD dari Biro MKKS.
5.	Penyusunan Hasil Tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan SP4N LAPOR!	Terlaksana	Telah dilakukan pemantauan secara berkelanjutan pada SP4N LAPOR. Sampai dengan Tw II, belum ada yang menyampaikan keluhan/masukan di SP4N LAPOR! Oleh karenanya belum perlu dilakukan tindak lanjut.
6.	Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan	Terlaksana	Telah disusun bahan pimpinan pada Apel pagi tanggal 8 Juni 2026.
7.	Pemenuhan Dokumen Pendukung Pemeriksaan Keuangan BPK	Terlaksana	Seluruh Permintaan Dokumen dari BPK telah ditindaklanjuti oleh Deputi II
8.	Koordinasi Hasil Rekomendasi BPK	Terlaksana	Telah dipenuhinya seluruh permintaan dokumen dan bukti dukung dari BPK.
9.	Penyampaian Usulan Data Responden Internal dan Eksternal Survei Penilaian Integritas	Tertunda	Usulan data responden Internal dan Eksternal Survei Penilaian Integritas namun penyampaian usulan anggota kelompok kerja SPI sudah disampaikan melalui ND Nomor: OT.05/128/D.II.M.EKON.1/5/2026
10.	Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK	Terlaksana	Terlaksana publikasi konten dan penggunaan logo berAKHLAK pada bahan paparan dan sertifikat pelatihan.

11.	Sosialisasi pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI)	Tertunda	Sosialisasi pengisian SPI tertunda menunggu arahan dari unit pengampu.
-----	---	----------	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi tersebut diantaranya melanjutkan metode koordinasi menjadi pertemuan online/daring melalui media zoom meeting atau hybrid serta memanfaatkan email internal kementerian antar unit eselon II atau unit pengampu seperti yang dilakukan pada triwulan I. Kebijakan ini terbukti mengefisienkan biaya konsumsi dan ruang rapat. Selain itu, efisiensi dilakukan dengan mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui digitalisasi penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, serta pemanfaatan one-drive sebagai penyimpanan berkas reformasi birokrasi. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di triwulan III atau kegiatan strategis lainnya sesuai arahan pimpinan.

Tantangan dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Internalisasi nilai-nilai RB belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai, sehingga implementasi di lapangan masih bersifat administratif.
2. Dikarenakan pemahaman terkait RB tersebut belum merata sehingga pemenuhan bukti dukung RB terkadang kurang sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan tantangan dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Upaya tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan program *Coaching Clinic* dan bekerja sama dengan Agen Perubahan (*Change Agent*) dalam memahami RB secara komprehensif kepada seluruh pegawai di Kedeputan.
2. Koordinasi dengan pengampu serta PIC Reformasi Birokrasi level Eselon II dalam penyelarasan tindak lanjut batas waktu administratif melalui grup komunikasi tidak berbayar serta menyediakan *one-drive* untuk mengunggah bukti dukung RB secara berkala.

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata

Ekonomi dan Investasi

kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung dokumen tata kelola meliputi dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan SOP. Adapun waktu dan format akan diatur lebih lanjut melalui nota dinas Kepala Biro yang akan mengampu dokumen dimaksud. Adapun ruang lingkup implementasi tata kelola secara spesifik tercantum pada tabel berikut:

No	Tata Kelola	Jenis Bukti Dukung	Jumlah Bukti Dukung	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Keuangan	- TOR dan RAB - ND Revisi POK - Laporan Realisasi dan Sisa Anggaran	6 Dokumen 6 Dokumen 12 Dokumen	- Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian - Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan - Usulan Penyesuaian Akun Anggaran, Alasan revisi berdasarkan IKU - Uraian program/kegiatan/RO/Komponen, Pagu, Realisasi, Sisa anggaran	- Pertengahan tahun untuk tahun berikutnya - Tanggal 25 setiap bulan pengajuan - Tanggal 5 bulan berikutnya
2.	Sistem Pengendalian Internal	- Kertas Kerja Manajemen Risiko - Kertas Kerja SPIP	7 Dokumen 1 Dokumen	Form Konteks, Form Profil & Peta Risiko, Form Mitigasi Risiko, Perka BPKP 5/2021	- Mengacu pada ND Inspektur - Mengacu pada ND Inspektur
3.	Tata Laksana dan SDM	- ND Usulan Kenaikan Pangkat - ND Usulan Kenaikan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	- Data Pegawai, Dokumen Pendukung - Data Pegawai, Dokumen	- Menyesuaikan kebutuhan pegawai - Mengacu

		Jenjang ND Usulan Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	Pendukung Data Pegawai, Dokumen Pendukung	pada ND Kepala Biro Umum dan SDM Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM
4.	Barang Milik Negara	ND Rencana Kebutuhan BMN	1 Dokumen	Jumlah Kebutuhan, Tahun Anggaran	Mengacu pada ND Kepala Biro Umum dan SDM (Akhir Tahun untuk 2 Tahun Berikutnya)
5.	Kearsipan	Rekap Dokumen dalam Srikandi	12 Rekap Dokumen	Dokumen terdisposisi Dokumen tertandatangani Pemberkasan	Tanggal 5 bulan berikutnya
6.	Humas	Publikasi melalui website atau social media	4 Dokumen Rekap Hasil Publikasi	Kegiatan Pimpinan/ Masing-masing unit kerja	max 3 hari setelah kegiatan
7.	Naskah Pimpinan	1. Bahan Sambutan Deputi untuk Apel Pagi 2. Bahan Dialog Kinerja	1. 4 Dokumen 2. 1 Dokumen	1. Update isu strategis dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan 2. Update isu strategis, evaluasi kegiatan yang dilakukan dan arahan ke depan	1. H-3 pelaksanaan Apel Pagi 2. H-2 Sebelum Pelaksanaan Dialog Kinerja
8.	Standar Operasional Prosedur/ SOP	SOP Koordinasi Data dan Informasi Tata Kelola di Lingkungan D2	1 Dokumen	Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di lingkungan Deputi atas inisiatif Unit kerja dan atas permintaan Sekretariat Kementerian/ Inspektorat	Triwulan I
	Total		58 Dokumen		

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi:

$$\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Total Skor Bidang Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Skor Bidang Tata Kelola yang diharapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pasal 68 dan 69 terkait tugas dan fungsi Sekretariat Deputy dan dokumen perencanaan Perencanaan Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 50%.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terealisasi sebesar 50% atau mencapai kinerja 100% dari target Triwulan II Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	50	50	100

Dokumen bukti dukung tata kelola yang dihasilkan sesuai standar pada Triwulan II 2026 sebanyak 17 dokumen dengan rincian:

1. Rekapitulasi Pengumpulan Bukti Lapo Pajak Pegawai dan LHKPN pejabat tertentu (1 Paket dokumen)
2. TOR dan RAB (6 dokumen)
3. Laporan Realisasi Anggaran (3 dokumen)
4. Rekap Dokumen Dalam Srikandi (3 dokumen)
5. Bahan Sambutan Deputy pada Apel pagi 8 Juni 2026 (1 dokumen)

Capaian optimal ini diperoleh melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan kedeputan berjalan sudah cukup baik. Seluruh dokumen dinas dan koordinasi kebijakan telah terdigitalisasi dengan standar keamanan informasi yang baik. Mengingat implementasi tata kelola pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berjalan dengan baik maka

diprediksikan kinerja Sekretariat Deputy terkait implementasi tata kelola yang baik juga terpenuhi sesuai target tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Rekapitulasi Pengumpulan Bukti Lapor Pajak Pegawai dan LHKPN pejabat tertentu	Terlaksana	Telah dilakukan Rekapitulasi Pengumpulan Bukti Lapor Pajak Pegawai dan LHKPN Pejabat Tertentu pada tw II
2.	Monitoring Pengajuan usulan uji kompetensi dan kenaikan pangkat pegawai pada Triwulan II	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan pengusulan Kenaikan Pangkat Analis Kebijakan Ahli Pertama an. Nanang Rafii Misbahhudin di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.04.02/97/D.II.M.EK ON.1/10/2026 tanggal 23 April 2026. 2. Telah dilaksanakan pengusulan Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Analis APBN Muda an. Rendyawan Aristyo di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

			melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.04.02/108/D.II.M.EK ON.1/05/2026 tanggal 5 Mei 2026 3. Telah dilaksanakan pengusulan Pegawai Mengikuti Uji Kompetensi untuk Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya an Dian Pratiwi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.08.01/116/D.II.M.EK ON.1/05/2026 tanggal 11 Mei 2026. 4. Telah dilaksanakan pengusulan Kenaikan Pangkat Analis Kebijakan Ahli Pertama an. Ika Akbarwati dan Nadya Permata Putri di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.04.02/118/D.II.M.EK ON.1/05/2026 tanggal 12 Mei 2026. 5. Telah dilaksanakan pengusulan Pegawai Mengikuti Uji Kompetensi untuk Jenjang Jabatan
--	--	--	--

			Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya an. Risa Qoni'ah di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas resmi kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No: KP.08.01/139/D.II.M.EK ON.1/06/2026 tanggal 8 Juni 2026.
3.	Pelaksanaan Pelatihan/ Workshop untuk pegawai di unit kerja sesuai minat dan kompetensi	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelatihan dan Workshop bagi pegawai di Deputy bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada tw II 2026
4.	Koordinasi Penyiapan bahan pimpinan pada Apel Pagi	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Koordinasi penyiapan bahan arahan pimpinan (<i>townhall</i> atau Dialog Kinerja) terkait pelaksanaan <i>Work From Anywhere</i> (WFA) oleh Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi tanggal 17 April 2026. 2. Telah dilaksanakan koordinasi penyiapan naskah pimpinan untuk pelaksanaan apel pagi pada tanggal 8 Juni 2026;
5.	Pelaksanaan dan Monitoring Tata Kelola Persuratan Menggunakan Srikandi pada Triwulan II	Terlaksana	Telah terlaksanakan proses persuratan menggunakan aplikasi Srikandi sesuai dengan ketentuan terbaru secara konsisten dan berkelanjutan di Triwulan II Tahun 2026

6.	Monitoring Anggaran Triwulan II	Realisasi selama	terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring realisasi anggaran selama Triwulan II tahun 2026.
----	---------------------------------	------------------	------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja diantaranya melakukan koordinasi Permohonan Tindak Lanjut Kenaikan Pangkat/Golongan dan/atau Jenjang Jabatan Pegawai yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia melalui Nota Dinas resmi Nomor: KP/136/D.II.M.EKON.1/6/2026 tanggal 3 Juni 2026. Melalui ND ini diharapkan ada tindak lanjut untuk melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta langkah langkah yang diperlukan guna membantu penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi pegawai di lingkungan Deputi bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sehingga kenaikan pangkat/golongan dan/atau kenaikan jenjang jabatan berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, telah dilaksanakan juga dialog kinerja bersama pimpinan Sekretariat Deputi yang dilaksanakan secara rutin dalam 1 bulan pelaksanaannya minimal 1 kali. Selain memonitor capaian kinerja, agenda dalam dialog kinerja tersebut juga berupa arahan pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dicapai secara oprimal.

Dalam rangka mendukung optimalisasi anggaran namun berorientasi pada pemenuhan target, tata kelola kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada triwulan II dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran diantaranya:

1. Melanjutkan upaya efisiensi di triwulan I, tetap mengoptimalkan platform digital internal Kemenko Perekonomian seperti SRIKANDI, email kementerian, serta penyimpanan berbasis awan (*cloud-based workspace*) pada proses penyusunan, reviu, dan penyebaran instrumen tata kelola;
2. Memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas; serta melanjutkan koordinasi antar unit eselon II melalui rapat daring atau penggunaan grup pesan instan yang tidak berbayar.

Langkah-langkah tersebut memangkas pengeluaran paket rapat, uang saku, konsumsi, dan transportasi dinas secara signifikan tanpa mengurangi kualitas hasil koordinasi. Adapun proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp.142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tata kelola di triwulan III atau kegiatan strategis lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala tersebut antara lain:

1. Penggunaan SRIKANDI belum dilakukan oleh seluruh pegawai dan pemahaman dalam klasifikasi persuratan dalam aplikasi tersebut juga belum merata oleh seluruh pegawai.
2. Masih terdapat kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, yang terkadang menghambat kecepatan proses tata kelola di kedeputian.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan diantaranya:

1. Mendorong penggunaan SRIKANDI oleh seluruh pegawai dan menyediakan resume klasifikasi surat yang lebih mudah dipahami berdasarkan Permenko No. 21 Tahun 2025.
2. Berkoordinasi dengan teknisi internet di lingkungan Kementerian agar kendala internet dapat diatasi segera.

1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan tahun 2026 diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy (sebagai acuan), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, TOR RAB, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

No	Perencanaan	Jumlah Dokumen	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Perjanjian Kinerja	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2026
2.	Manual IKU	7 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>	2 Januari 2026
3.	Rencana Aksi	7 Dokumen	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target, Inisiatif Strategis, Rencana Aksi Kinerja	2 Januari 2026
4.	Rencana Kerja	1 Dokumen	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i> memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan prakiraan maju	Awal tahun untuk tahun berikutnya
5.	TOR dan RAB	6 Dokumen	Latar Belakang, Penerima Manfaat, Strategi Pencapaian Keluaran, Biaya yang Dibutuhkan	Pertengahan untuk tahun berikutnya
6.	Sasaran Kinerja Pegawai	1 Dokumen	- Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi - Rencana hasil kerja - Indikator kinerja individu - Target	31 Januari 2026
Total		29	Dokumen	

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi :

$$\text{Tingkat Efektivitas Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi}}{\text{Jumlah Bukti Dukung Perencanaan yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pasal 68 dan 69 terkait tugas dan fungsi Sekretariat Deputy dan dokumen perencanaan Perencanaan Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Tahun 2026. Adapun target triwulan II sebesar 50%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target atau terealisasi sebesar 50% atau mencapai kinerja sebesar 100% dari target tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	50	50	100 (Memuaskan)

Dokumen perencanaan yang telah dihasilkan sesuai standar pada triwulan II Tahun 2026, yaitu:

1. Rincian output dan kerangka pendanaan pada Renja 2027
2. Bahan Banggar Pimpinan dengan DPR-RI

Capaian ini terpenuhi melalui keberhasilan unit dalam menyelaraskan target kebijakan kerja sama ekonomi dan investasi ke dalam target operasional di setiap unit Eselon II, sehingga pelaksanaan program dilakukan secara akuntabel dan terukur sejak awal tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pengusulan rincian output dan kerangka pendanaan pada Renja 2027	Terlaksana	Telah dilakukan Pengusulan rincian output dan kerangka pendanaan pada Renja 2027
2.	Penyiapan Bahan Banggar	Terlaksana	Telah diselesaikannya bahan Bangar yaitu Inisiasi Program Kerja tahun 2027 di Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yaitu: 1. Percepatan Penyelesaian Perundingan I-EU CEPA 2. Akses OECD 3. Penyelenggaraan Pertemuan The Six Bilateral Economic Working Group Indonesia-Singapura 4. Implementing Arrangement Indonesia-Korea CEPA (IA-IKCEPA) 5. Tindak lanjut perjanjian perdagangan resiprokal RI-AS 6. Fasilitasi investasi dan perbaikan iklim investasi 7. Pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi dan industrialisasi 8. Pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam <i>Asian Zero Emission Community</i> (AZEC) dan Joint Crediting Mechanism (JCM) 9. Optimalisasi kerja sama Bilateral dan Regional untuk peningkatan

			pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA. 10. Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-30 11. Penyelenggaraan Tuan Rumah Strategic Planning Meeting BIMP-EAGA 12. Penyelenggaraan Tuan Rumah Strategic Planning Meeting IMT-GT
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan diantaranya:

1. Melanjutkan upaya efisiensi di triwulan I, penyusunan perencanaan Berbasis *Shared-Workspace* dimana proses *brainstorming*, penyelarasan target, hingga reviu draf dokumen perencanaan antar-unit eselon II dilakukan sepenuhnya menggunakan platform kerja digital dan *cloud-based shared drive*. Langkah ini berhasil mengefisienkan biaya pencetakan kertas (*paperless*) dan penggandaan berkas kerja yang biasanya memakan porsi anggaran cukup besar.
2. Rapat koordinasi dalam rangka penajaman target perencanaan dilaksanakan melalui pertemuan daring atau koordinasi di grup aplikasi pesan yang tidak berbayar.

Upaya tersebut ini secara signifikan memangkas komponen belanja paket rapat, uang saku rapat, konsumsi, dan biaya transportasi dinas lokal tanpa mengurangi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan atau kegiatan strategis lainnya sesuai arahan pimpinan yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Tingginya dinamika perubahan agenda kerja sama internasional dan percepatan investasi menyebabkan target waktu pelaksanaan program kerja bergeser dari rencana awal dan menyerap anggaran lebih besar dari perencanaan.

2. Proses revisi anggaran antar-akun atau antar-kegiatan membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga berpotensi menunda implementasi kegiatan yang mendesak.

Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 serta kendala yang dihadapi, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu:

- 1) Menyusun fleksibilitas revisi perencanaan operasional dalam hal ini dituangkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja yang dapat disesuaikan secara fleksibel namun tetap akuntabel guna merespons dinamika perubahan agenda kerja sama ekonomi internasional dan investasi serta melakukan revisi anggaran;
- 2) Melakukan inventarisasi dan koordinasi usulan revisi anggaran agar proses pengajuan ke Kemenkeu lebih efisien.

**2.1. Tingkat Ketaatan
Pelaporan Deputy
Bidang Koordinasi
Kerja Sama
Ekonomi dan
Investasi**

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan nya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir)
2. E-Monev, (2 hari kerja pada tiap bulan)
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir februari pada tahun berjalan) dan
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12)

Laporan dikatakan memenuhi standar jika telah memenuhi standar substansi dan ketepatan waktu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan	Standar Substansi	Standar Ketepatan Waktu
1.	Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV	4 Dokumen	▪ Ringkasan Kinerja Triwulanan ▪ Narasi setiap IKU ○ Latar belakang ○ Hasil pengukuran kinerja ○ Pelaksanaan Rencana Aksi triwulanan, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ○ Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target	15 hari kerja setelah triwulan berakhir
2	E-Monev	12 Dokumen	1. Pemantauan komponen a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran 2. Pemantauan rincian output Renja a. Status pelaksanaan b. Realisasi fisik c. Realisasi anggaran	5 hari kerja pada tiap bulan
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	▪ Daftar isi ▪ Peristiwa penting 2026 ▪ Ringkasan eksekutif ▪ Bab I : Pendahuluan ▪ Bab II : Perencanaan kinerja ▪ Bab III : Akuntabilitas Kinerja ▪ Bab IV : Evaluasi dan kinerja ▪ Bab V : Kesimpulan dan penutup	Konsep pada akhir Desember, final pada akhir februari pada tahun berikutnya
4	Laporan SKP Triwulan I s.d IV	5 Paket Dokumen	▪ Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ▪ Rencana hasil kerja ▪ Aspek ▪ Indikator kinerja individu ▪ Target ▪ Realisasi berdasarkan bukti dukung dan umpan balik	Minggu terakhir pada bulan April, Juli, Oktober, Desember.

Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat laporan yang dilaksanakan standar ketuntasan}}{\text{Tingkat laporan yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target yang telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai kinerja 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	50	50	100% (Memuaskan)

Capaian optimal pada triwulan II ini diperoleh melalui keberhasilan unit dalam menyusun dan menyampaikan seluruh laporan manajerial serta laporan akuntabilitas secara tepat waktu dan substansi sesuai standar seperti yang dilakukan di triwulan sebelumnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan II

			Tahun 2026 sesuai tenggat waktu yang ditentukan
2.	Penyusunan Laporan E-Monev Bulan April s.d. Juni 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan secara rutin pengisian laporan capaian anggaran melalui E-Monev pada setiap awal bulan pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan SKP Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengkoordinasian SKP Realisasi pada Triwulan II Tahun 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain melaksanakan koordinasi perhitungan, pelaporan dan penetapan Penilaian Kinerja Organisasi Unit Eselon 1 dan 2 di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dan dilaporkan kepada Tim PKO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk unit Eselon I, dan disampaikan kepada Deputy untuk unit eselon II.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melanjutkan upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan di triwulan I dimana proses kompilasi data, reviu konsep laporan, hingga finalisasi dokumen secara digital menggunakan aplikasi internal di Kemenko Perekonomian dan penyimpanan awan (*cloud storage*). Penyampaian laporan ke unit pengampu dikirimkan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*), sehingga efisiensi anggaran dalam hal pencetakan, penjilidan, dan biaya logistik;
2. Secara berkala melakukan proses koordinasi dan rekonsiliasi data capaian kinerja dan realisasi anggaran melalui platform daring/digital.

Adapun perkiraan efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan atau kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Meskipun pada Triwulan II Tahun 2026 berhasil dipenuhi secara optimal, proses mempertahankan ketaatan pelaporan di tingkat kedeputan menghadapi beberapa

tantangan dinamis diantaranya terdapat data realisasi yang masih menunggu publikasi dari K/L teknis sehingga data yang tertulis di laporan belum update.

Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 serta kendala yang dihadapi, maka disusun beberapa rekomendasi yaitu melakukan koordinasi secara berkelanjutan dan ke depan diharapkan dapat melakukan analisis *forecasting* data tersebut.

Diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik dengan memperkuat sinergi antar unit kerja Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi serta dengan Kementerian/Lembaga terkait.

2.2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputy untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputy. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputy bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus ke deputian.

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada tahun ini mengawal isu – isu strategis ke deputian yang meliputi :

1. Posisi Indonesia terhadap usulan Pendirian Organisasi AI dunia (*World Artificial Intelligence Cooperation Organization*);
2. Potensi Kerja Sama RI RRT dalam mendukung Pengembangan Artificial Intelligence Development di Indonesia;
3. Penerimaan Kunjungan dari Delegasi RRT ke Indonesia dalam rangka Kerja Sama Ekonomi, Investasi, dan Inovasi;
4. Kerjasama RI-RRT untuk Pelatihan on *Upskilling Negotiation for Government Officials* of Indonesia

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila:

- (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait;
- (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Deputy; dan
- (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Isu} - \text{Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi memiliki beban cakupan kerja yang sangat luas meliputi kerja sama ekonomi dalam format bilateral, regional, maupun multilateral, percepatan investasi dan hilirisasi, serta implementasinya dalam kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Luasnya cakupan kerja tersebut membutuhkan peran Sekretariat Deputy untuk mengemban fungsi koordinasi kebijakan yang bersifat cross-sectoral sehingga dari seluruh fungsi Asisten Deputy dapat memberikan output rekomendasi kebijakan yang terarah dan tersinkronisasi.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, IKU Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy ditetapkan target sebesar 50% dan berdasarkan hasil evaluasi, pengawalan substansi, dan pemantauan direktif pimpinan yang dilakukan oleh Sekretariat Deputy, indikator ini terealisasi sebesar 50% atau mencapai kinerja sebesar 100% dari target Tw II Tahun 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	Persen	50	50	100 (Memuaskan)

Capaian sampai dengan triwulan II dicapai melalui keberhasilan unit dalam menyelesaikan arahan pimpinan terkait isu-isu strategis. Faktor penentu keberhasilan capaian antara lain:

1. Sekretariat Deputy secara berkelanjutan membangun koordinasi dan komunikasi baik formal maupun informal dengan Kementerian/Lembaga teknis dan Stakeholder terkait sehingga penyelesaian isu strategis dapat berjalan efektif
2. Dengan adanya dukungan teknologi *Artificial Intelligence* dipadukan dengan kemampuan dan keahlian pegawai di Sekretariat Deputy, penyusunan *background paper*, *fact sheet*, serta analisis mendalam dapat dilakukan

secara cepat dan berkualitas meskipun di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan Pelatihan <i>Upskilling for Government Officials of Indonesia</i> bekerja sama dengan RRT	Tertunda	Pelaksanaan pelatihan tersebut tertunda dan bergeser ke triwulan berikutnya karena masih menunggu respon dari pihak RRT. Pimpinan Deputi II sudah mengirimkan surat dinas kepada kedutaan besar RRT Nomor : B/KSE.01.02/58/D.II.M.E KON/05/2026 tanggal 21 Mei 2026.
2.	Koordinasi Posisi Indonesia terhadap usulan Pendirian Organisasi AI dunia (<i>World Artificial Intelligence Cooperation Organization</i>)	Terlaksana	1. Telah diterima arahan dari Bapak Menko tanggal 21 April 2026 terhadap Berita Rahasia Duta Besar LBBP RI di Beijing Nomor: R-00081/BEIJING/240407 tentang perkembangan rencana Pembentukan WAICO. 2. Telah disusun Nota Dinas Nomor: KSE.05.03/112/D.II.M. EKON.1/5/2026 tentang Landasan Analisis Posisi

			sebagai Observer dalam Inisiasi World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) kepada Bapak Deputi sesuai arahan sebelumnya. 3. Telah dikirimkan surat dinas kepada Duta Besar RRT Nomor: KSE.05.03/\$3 /D.II.M.EKON/05/2026 tanggal 8 Mei 2026 yang intinya menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam keanggotaan WAICO Adalah sebagai observer atau negara pengamat. 4. Telah dihadiri Rapat Persiapan Partisipasi Pemerintah RI pada World Artificial Intelligence Conference, High-Level Meeting on Global AI Governance, dan Peresmian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), Shanghai, 16–20 Juli 2026 yang diselenggarakan oleh Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu pada tanggal 29 Juni 2026 secara daring.
	Koordinasi Kerja Sama RI-RRT dalam mendukung Pengembangan <i>Artificial Intelligence</i>	terlaksana	Kerja Sama RI-RRT dalam mendukung Pengembangan <i>Artificial Intelligence Development</i> di Indonesia merupakan bagian dari inisiasi

	<i>Development</i> di Indonesia		pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization oleh pihak RRT sehingga dengan tercapainya koordinasi WAICO dengan KL dan stakeholder terkait, maka terpenuhi juga koordinasi Kerjasama ini.
	Koordinasi Persiapan Penerimaan Kunjungan dari Delegasi RRT ke Indonesia dalam rangka Kerja Sama Ekonomi, Investasi, dan Inovasi	terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama K/L terkait hal Persiapan Penerimaan Kunjungan dari Delegasi RRT ke Indonesia yaitu Tim Aju Provinsi Guandong Tiongkok pada tanggal 15 April 2026. Adapun kunjungan delegasi tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada 26-28 Agustus 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi *Draft Proposal Green Partnership Agreement for Development* yang diinisiasi oleh RRT. Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyelesaian isu strategis tersebut antara lain:

1. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan awal Draft Proposal Green Partnership Agreement for Development pada tanggal 13 Mei 2026 secara daring.
2. Rapat Koordinasi Teknis Lanjutan dalam Pembahasan Draft Proposal Green Partnership Agreement for Development pada tanggal 19 Mei 2026 secara hybrid.
3. Pertemuan bilateral dengan RRT pada tanggal 17 Juni 2026 di gedung pos Ibukota Jakarta Pusat membahas beberapa hal terkait usulan proposal tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melanjutkan upaya efisiensi di triwulan I, proses koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/Lembaga terkait dialihkan secara optimal menggunakan platform pertemuan daring (*online meeting*) atau *hybrid*. Hal ini berhasil memangkas anggaran biaya sewa ruang rapat, konsumsi, dan biaya perjalanan dinas secara signifikan;
2. Seluruh dokumen draft agreement RI-China disusun, direviu, dan didistribusikan secara *paperless* melalui *shared-cloud workspace* internal,

sehingga berhasil menurunkan belanja logistik alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan dokumen fisik berskala besar.

Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penyelesaian isu-isu strategis di triwulan berikutnya atau kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Dinamika kebijakan ekonomi global dan perubahan regulasi berpengaruh kepada ketidakpastian kebijakan negara mitra dalam hal ini RRT sehingga ada program atau kegiatan yang tertunda pelaksanaannya;
2. Isu strategis dari pimpinan sering kali bersifat mendesak (*ad-hoc*) di luar kalender kerja rutin, sehingga menantang kapasitas personel yang terbatas untuk membagi fokus antara tugas rutin dan penyelesaian isu prioritas pimpinan secara simultan.

Berdasarkan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 serta kendala yang dihadapi, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu:

1. Memahami dinamika kebijakan ekonomi global dan perubahan regulasi yang terjadi dengan tetap berkoordinasi secara proaktif kepada Pemerintah RRT dan juga koordinasi lintas K/L..
2. Mengompilasi seluruh dokumen terkait kerja sama Indonesia-China dalam satu database digital (*one drive*), guna mempercepat proses referensi bagi pegawai dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang nantinya disampaikan kepada pimpinan. Selain itu, melalui penggunaan teknologi AI yang saat ini sudah semakin maju, penyediaan data dan analisis untuk pimpinan menjadi lebih cepat namun tetap berkualitas.

2.3. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian

pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2

Rumus Pengukuran:

$$\frac{\text{Nilai Rata-rata Komponen Pengungkit}}{\text{Nilai Minimal Komponen Pengungkit}} \times 100\% = \frac{\text{Realisasi Komponen Pengungkit}}{\text{Nilai Minimal Komponen Pengungkit}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 75% didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Adapun target triwulan sebesar N/A.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan verifikasi dokumen pendorong yang dilakukan oleh Sekretariat Deputy, Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mencapai target yang telah terealisasi sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2026 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Persen	75%	N/A	100

Realisasi triwulan II didorong oleh tingginya komitmen pimpinan dan juga seluruh pegawai Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan matriks pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI pada 6 (enam) area perubahan menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi pada tahun 2025 memperoleh nilai 76,25%. Pada tahun 2026 sudah dilakukan tindak lanjut pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI tersebut. Sudah terjadi kenaikan nilai dari Tim Penilai Inspektorat namun nilai yang baku masih menunggu pengumuman resmi dari KemenPAN-RB.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Zona Integritas Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi internal Zona Integritas Triwulan I sesuai dengan rencana aksi pembangunan zona integritas Kedeputian 2
2.	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Triwulan I	Terlaksana	Telah berhasil disusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Triwulan I
3.	Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas Triwulan I dan II melalui media elektronik dan nonelektronik

4.	Identifikasi dan peluncuran inovasi layanan	Terlaksana	Telah dilakukan Identifikasi dan peluncuran inovasi layanan internal Sesdep dengan penambahan fitur-fitur terkait akuntabilitas kinerja anggaran dan peningkatan kapasitas pegawai pada sistem SIPENTAKEL Ekoves. Selain itu juga telah disusun inovasi layanan kepada eksternal stakeholder di lingkungan Kedeputan 2 terkait "Program Accelerating Core Economics" (PACE) yang merupakan sistem informasi pelaporan dan pemantauan kerja sama ekonomi internasional terintegrasi lintas K/L.
5.	Penyusunan Piagam Risiko dan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Telah ditandatanganinya Piagam Risiko dan disusun Formulir Matriks Manajemen Risiko baik di level Eselon I dan II
6.	Pengisian matriks Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Tahun 2026	Terlaksana	Telah berhasil dilakukan pengisian matriks Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Tahun 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, terdapat upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja indikator ini antara lain dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk pembangunan Zona Integritas kepada seluruh stakeholder penerima layanan dari unit kerja Deputy Bidang Koordinasi

Kerja Sama Ekonomi dan Investasi pada periode April dan Mei 2026 melalui laman: <https://tinyurl.com/ZID2Apr26> dan <https://tinyurl.com/ZID2Mei26>.

Pelaksanaan rencana aksi sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya: Pemenuhan bukti dukung pembangunan ZI (SK, Nota Dinas, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, dan dokumen terkait lainnya) pada 6 area perubahan dikompilasikan ke dalam *cloud-based shared drive* internal yang dapat diakses oleh unit pengampu sehingga proses koordinasi berjalan efisien dan efektif.

Langkah-langkah tersebut mengefisienkan kebutuhan anggaran dokumen fisik yang biasanya memakan biaya logistik tinggi dalam penilaian ZI. Proyeksi efisiensi adalah sebesar Rp. 142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi atau kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yakni :

1. Tantangan untuk menanamkan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administratif formalitas untuk meraih predikat WBK/WBBM, melainkan sebuah transformasi budaya kerja nyata dalam pelayanan;
2. Terdapat bukti dukung pembangunan ZI yang sebenarnya unit pengampunya di level Kementerian sehingga penyertaan bukti dukung Pembangunan ZI di Unit kerja harus menunggu terselesaikannya dokumen tersebut sehingga berdampak pada kurang optimalnya nilai ZI yang diraih unit kerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Menyelenggarakan sesi diskusi/ coaching clinic singkat terkait ZI dan/ atau area perubahannya melalui metode hibrida/daring;
2. Berkoordinasi secara intensif dengan unit pengampu serta unit kerja eselon II di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sehingga internalisasi budaya kerja yang akuntabel serta pemenuhan bukti dukung pembangunan ZI dapat dicapai dengan optimal.

2.4. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata

kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Layanan Sekretaris Deputy adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Deputy kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam:

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Deputy.

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputy mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sesdep kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur melalui Survey Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Daftar pertanyaan survey terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sesdep kepada Deputy. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar N/A karena pada IKU Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi ditetapkan berdasarkan target semesteran yakni 3 dari 4 yang akan dicapai oleh Sekretariat Deputy dalam rangka pemenuhan kepuasan layanan Sekretaris Deputy dalam pelayanan kegiatan deputy serta administrasi program dan tata kelola bagi pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi telah terealisasi sebesar N/A atau mencapai N/A dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan	Indeks	3 dari 4	3,90 (3 dari 4)	100%

Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi				
--	--	--	--	--

Capaian optimal ini mencerminkan keberhasilan Sekretariat Deputi dalam memberikan layanan fasilitasi administratif dan teknis yang komprehensif. Kualitas layanan kedeputian dinilai sangat memuaskan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik unit internal (Asisten Deputi) maupun mitra eksternal (Kementerian/Lembaga) teknis terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan penyusunan Survei Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat internal Sekretaris Deputi dalam rangka penguatan dalam memberikan layanan yang prima serta diantaranya arahan penyusunan survei kepuasan Triwulan II tahun 2026.
2.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Triwulan II melalui link google form yang terintegrasi	Terlaksana	Telah terlaksana survei kepuasan di Semester II Tahun 2026 melalui link google form yang terintegrasi.

3.	Evaluasi hasil survei Tw II dari sisi Kepastian dalam Pelayanan	Terlaksana	Telah dilaksanakannya evaluasi hasil survei Tw II dari sisi Kepastian dalam Pelayanan.
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan membantu unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam penyusunan indikator dan formulir survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, sama seperti yang dilakukan pada triwulan sebelumnya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Pelaksanaan survei kepuasan layanan dilakukan sepenuhnya secara digital menggunakan platform pengolah formulir daring secara gratis.
2. Sekretariat Deputi memaksimalkan penggunaan aplikasi pesan instan koordinasi dan persuratan elektronik melalui SRIKANDI sebagai saluran komunikasi operasional. Hal ini secara signifikan menghemat biaya operasional harian kantor serta mempercepat waktu penyelesaian dokumen.

Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 142.443.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya sesuai arahan pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya

1. Tingkat partisipasi responden di triwulan II sudah meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun jumlahnya masih relatif sedikit terutama karena mitra yang memiliki kesibukan tinggi atau mitra yang berpandangan survei ini hanya untuk kepentingan administratif semata.
2. Banyaknya survei internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadikan responden yang mengisi kuesioner mengisi secara formalitas saja demi menggugurkan kewajiban, sehingga akurasi data menurun.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain:

1. Mengagendakan pengisian survei sebagai bagian dari check-list penutupan sebuah kegiatan/pertemuan.
2. Menjalin komunikasi yang efektif dengan para mitra selain memberikan narasi pengantar pada awalan survei supaya responden memiliki pemahaman dan mengisi survei dengan akurat.

Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026 terlaksana dengan baik dan diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Jakarta, 10 Juli 2026

Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja
Sama Ekonomi dan Investasi



Jenny MT. Sihombing